

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kepercayaan kepada pemerintah pusat untuk mengelola suatu daerah dengan dengan baik. Otonomi daerah sendiri bertujuan untuk mencapai tata kelola yang baik pada pemerintah daerah. Salah satu cara mewujudkan tata kelola yang baik yaitu dengan menerapkan akuntabilitas. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa kinerja dapat diukur dengan melihat kuantitas dan kualitas penggunaan anggaran untuk keluaran/hasil kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai.

Akuntabilitas Manajerial mengharuskan lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas Program berhubungan dengan estimasi program yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan pertimbangan organisasi dalam mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil maksimal dengan biaya paling minimal. Akuntabilitas Kebijakan berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Akuntabilitas Keuangan berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif dengan artian tidak adanya pemborosan, kebocoran, dan korupsi (Jatmiko, 2020).

Pemerintah sejatinya harus berorientasi pada kepentingan publik. Namun pada kenyataannya ada beberapa masalah yang kemudian menjadi sorotan publik, bahwa kinerja pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting (SMRC)* bahwa 47% masyarakat memberi penilaian kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran selama setahun terakhir semakin menurun, 34% masyarakat menilai tidak ada perubahan pada pemerintah, dan hanya 17% masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran semakin meningkat (BeritaSatu.com, 2021). Menurut buku (Wartapemeriksa, 2022) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan pemborosan pada kartu prakerja, karena bantuan itu terindikasi tidak tepat sasaran dan ada 42 peserta yang mengikuti program prakerja namun Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak berlaku. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Dengan Tujuan Khusus (PDTT) yang dilakukan oleh BPK tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun anggaran 2021, BPK menemukan bahwa penetapan dan penyaluran bantuan sosial PKH dan Pangan Pokok/Makanan Non Tunai Bantuan (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun anggaran 2022 tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak Rp 6,93 triliun.

Jika dilihat dari lingkup yang lebih spesifik, ada beberapa kasus menunjukkan penilaian negatif pemerintah seperti yang terjadi di Kota Manado. Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado dinilai buruk oleh sebagian masyarakat, karena

sangat lamban dalam mengelola berkas Kartu Keluarga (Manadopost 2020). Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (CAPIL) pada penduduk yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah daerah. Di Indonesia konsep akuntabilitas hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini terlebih dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan (Audyta, 2013). Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari masyarakat untuk kepentingan publik dan benar-benar tepat sasaran. Akuntabilitas Keuangan merupakan bagian dari dimensi Akuntabilitas Publik yang mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan laporan keuangan.

(Binawati, 2015) memandang bahwa, penerapan Akuntabilitas Keuangan secara efektif disuatu daerah maka mampu mendukung terciptanya Akuntabilitas Kinerja suatu daerah. Pemerintah yang dapat memberikan laporan keuangan secara lengkap dan memaparkannya secara tepat waktu serta mampu memberikan respon secara cepat terhadap hasil pemeriksaan maka dapat digunakan dalam mengambil keputusan dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan wewenang dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja. Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Laporan

Keuangan dapat membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat. Jika Transparansi tidak diterapkan dengan baik, maka hilang sudah kredibilitas organisasi.

Pemimpin organisasi berperan menciptakan kinerja pada pemerintah daerah. Menurut (Lestari, 2016), terdapat pengaruh antara Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin organisasi mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang dapat memberikan motivasi dan bimbingan untuk mengarahkan bawahannya dapat bekerja lebih baik adalah kunci kesuksesan organisasi. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan *value for money (economy, efficiency, and efectivity)* dengan didorong dengan komitmen organisasi. Dimana apabila pemerintah selalu memihak kepentingan organisasi, maka organisasi itu akan terjaga keanggotaannya. Dalam menjamin terlaksananya *good governance*, maka perlu adanya pengendalian intern sebagai pengawas untuk memberikan keyakinan tercapainya suatu tujuan.

Pengawasan intern yang baik akan meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan tugas dan juga untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas atas pelaksanaan program atau kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, *good governance*, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Jatmiko, 2020). Sistem Pengendalian Intern

sebagai alat pengukuran kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan.

Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan atas capaiannya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012-2022 yang mana penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Indonesia kepada Bupati Sleman. Capaian ini dapat memberikan motivasi pegawai pemerintahan untuk tetap mempertahankan performa kinerja. (Slemankab.go.id, 2022). Namun pernyataan WTP bukan jaminan, kinerja pemerintah di Kabupaten Sleman.

Dilansir dari BPK masih ada beberapa temuan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan. Permasalahan tersebut seperti pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah belum memadai, pengelolaan izin reklame belum tertib, dan pengelolaan aset tetap belum tertib (Bpk.go.id, 2022).

Ada beberapa peneliti di Indonesia meneliti tentang Kinerja Pemerintah diantaranya (Novatiani, 2019), yang meneliti tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, mengatakan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian (Ibrahim, 2015), yang mengatakan Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja

Pegawai dan Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

Menurut (Maryati, 2013), yang meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu mengatakan Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin bagus gaya kepemimpinan dalam organisasi Pemerintah Provinsi Bengkulu, tapi tidak meningkatkan kinerja SKPD. Pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian (Lestari, 2016) dan (Claraini, 2017), yang mengatakan Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hasnani, 2016), mengenai Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengawasan Fungsional dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah mengatakan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Gumilang, 2019) bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi. Namun Peneliti lain seperti (Fadli Dahlan, 2020), (Tahar, 2020), dan (Adi, 2017) juga mendukung pernyataan (Hasnani, 2016), bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang berarti semakin tinggi Komitmen Organisasi maka Kinerja SKPD dapat meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pujiono, 2016), yang meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan

Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah mengatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dengan adanya Sistem Pengendalian Intern yang sesuai dengan penerapan aturan kerja maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Annisa, 2014), namun sejalan dengan penelitian (Lestari, 2016) dan (Claraini, 2017), yang mengatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah yang didukung oleh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2016) yang berjudul “Pengaruh *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Pariaman)”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pertama, penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel yaitu *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Intern sedangkan penelitian ini menggunakan variabel yang sama, namun menjabarkan *Good Governance* dengan menambahkan dua variabel yaitu Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Laporan Keuangan. Kedua, penelitian sebelumnya melakukan lokasi penelitian di Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Pariaman, sedangkan penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang dan faktor-faktor diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :

“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Sleman)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini peneliti merumuskan masalah kedalam beberapa bentuk kalimat pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas Keuangan secara empiris berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
2. Apakah Transparansi Laporan Keuangan secara empiris berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
3. Apakah Gaya Kepemimpinan secara empiris berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
4. Apakah Komitmen Organisasi secara empiris berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
5. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara empiris berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
6. Apakah Akuntabilitas Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang dari masalah diatas, maka peneliti ingin membuat batasan-batasan dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak terlalu meluas ke masalah yang tidak pokok dalam penelitian ini. Berikut merupakan batasan masalah yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan hanya terbatas menganalisis lima variabel independen yaitu Akuntabilitas Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner langsung. Adapun kurun waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
3. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Sleman.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Pengujian secara empiris pengaruh positif Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Pengujian secara empiris pengaruh positif Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
5. Pengujian secara empiris pengaruh positif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Untuk mengetahui secara simultan sejauh mana pengaruh positif Kinerja Pemerintah Daerah jika dilihat dari Akuntabilitas Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis atau Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah khususnya pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam hal kinerja organisasi.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah.

4. Bagi Pihak Luar

Penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris dan bermanfaat untuk ilmu akuntansi, terlebih bagi yang mengambil konsentrasi sektor publik serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan rangkaian dari uraian umum masing-masing bab dengan tujuan memperjelas suatu sistem pembahasan dan permasalahan penelitian. Bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

Berisi tentang kajian pustaka yang berupa beberapa penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pikir, dan perumusan hipotesis.

BAB 3 : METODA PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, definisi dan pengukuran variabel, dan rancangan analisis data.

BAB 4 : DATA DAN ANALISIS DATA

Berisi tentang data yang didapat dan menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan analisis deskriptif variabel, analisis uji asumsi klasik, analisis pengujian statistik non parametrik, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari pembahasan hasil analisis data dan saran-saran yang berguna untuk peneliti, pemerintah, dan pembaca.